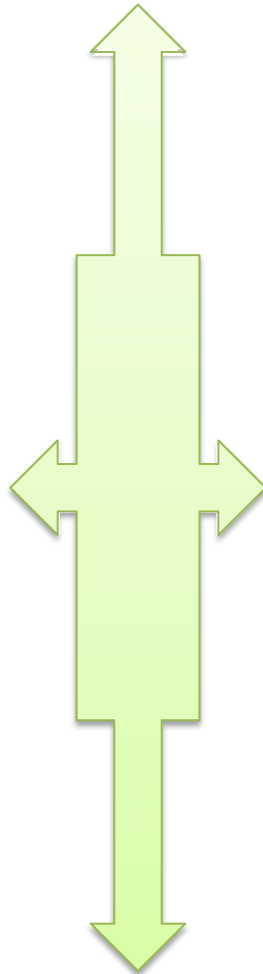


LAPORAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
(LAKIP)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN


BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas bimbingan dan petunjukNya, kami dapat menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk Sekretariat DPRD Kota Pekalongan. Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan satuan kerja di lingkungan Kota Pekalongan sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Setiap Instansi Pemerintah setiap Tahun Anggaran wajib menyusun LAKIP (Laporan Akuntansi Lintas Instansi Pemerintah) dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 yang akan disusun segera setelah anggaran selesai dilaksanakan dengan menggunakan format baru untuk LAKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 29 Tahun 2010. Sedangkan untuk LAKIP Sekretariat DPRD Kota Pekalongan selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksud untuk :

- 1) bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk tahun 2022.
- 2) Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Walikota dalam setiap tahunnya.
- 3) Bahwa untuk perbaikan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam masa-masa yang akan datang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menyusun LAKIP setiap Tahun Anggaran setiap Instansi masing-masing.

Demikian penyusunan LAKIP tahun 2022 dari Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Pekalongan, Pebruari 2023
SEKRETARIS DPRD KOTA PEKALONGAN

WIDARJANTO, SH.M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP.19660424 199603 1 002

A. Gambaran Umum

Sekretariat DPRD Kota Pekalongan terletak di Jl. Jl Mataram No 3 Kota Pekalongan dimana kedudukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Peraturan Daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas terhadap tiga bagian, yaitu Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Keuangan, serta bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (Dua) program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang direalisasikan sesuai target kinerja dan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Target kinerja merupakan perencanaan dan perjanjian kinerja yang berpedoman pada Dua Sasaran Strategis. Adapun anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD berasal dari APBD Perubahan Tahun 2022 untuk Belanja Langsung sebesar Rp 58.791.337.000,- (Lima puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

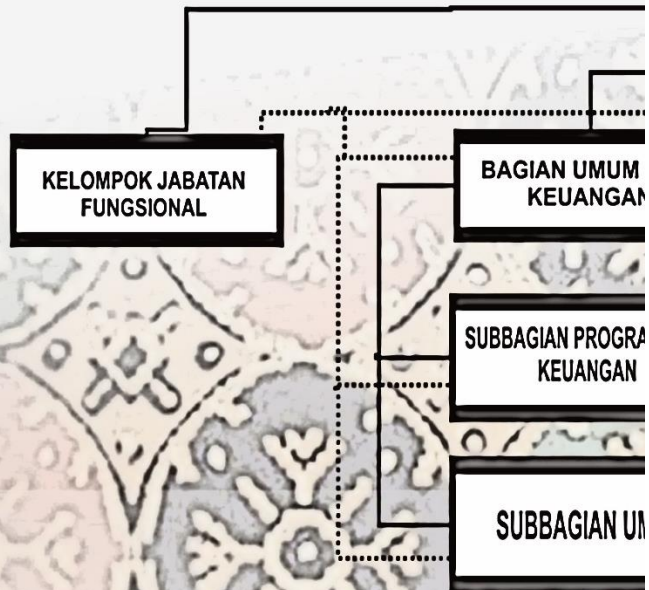
B. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran program bidang Sekretariat DPRD ;
- b. Perumusan kebijakan bidang Sekretariat DPRD ;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang administrasi umum dan perencanaan program serta keuangan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- f. Pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) ;
- g. Pengarahan pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB) ;
- h. Pengkoordinasian, pengendalian pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya .



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAK**



D. Isu Strategis

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi serta gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. Optimalisasi Kinerja Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD ;
3. Optimalisasi kinerja organisasi melalui penyusunan perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pengendalian internal organisasi ;
4. Telaahan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Pekalongan serta mendukung tercapainya Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapalandasan hukum sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, bebad korupsi, kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

RPJMD yang telah ditetapkan melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, mengalami perubahan disesuaikan dengan RPJMD Kota Pekalongan sekaligus menyederhanakan indikator kinerja.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :
“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan. 3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman. 4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan. 5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal. 6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah. 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

3. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat DPRD.Kota Pekalongan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isudan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota
Pekalongan

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT/ OUTOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGG UNGJAWA B	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Perda Yang Ditetapkan	Persen	100	100	100	22.143	100	19.478	100	19.451	100	18.812	100	19.100	100	98.983	
	Persentase Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Persen	100	100	100	471	100	418	100	410	100	404	100	410	100	2.112	

B. Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan WaliKota Pekalongan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Tingkat Kinerja Tahun		Registrasi Tahun 2022 Per Triwulan			
		2022	Perubahan Target 2022	I	II	III	IV
1	2	3		4	5	6	7
Nilai SAKIP OPD	Indeks	75,5					74,70
Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	%	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Sekretariat DPRD Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.

**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kota Pekalongan**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya akuntabilitaskinerja	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	75.50	74.70
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan terpenuhinya pelayanan penyelenggaraan agenda kerja DPRD	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	81.49	77.37
		- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100.00	100.00

Kode	Urusan/Program	Anggaran
02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.543.717.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	2.924.591.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.429.260.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.937.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.776.331.000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	21.444.598.000
	Layanan Administrasi DPRD	1.015.000.000

02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	24.247.620.000
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10.320.250.000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	300.000.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.271.700.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.510.150.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	9.845.520.000
	TOTAL JUMLAH ANGGARAN	58.791.337.000

22 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Perubahan RPJMD 2021-2026 sekaligus menerapkan cascading supaya terarah dan runtut sesuai jabatan diawali dengan tujuan dan sasaran (yang dimiliki oleh Kepala atau Eselon II) kemudian dijabarkan runtut sesuai dalam program (oleh Kepala Bagian atau Eselon III) dan dijabarkan ke kegiatan (oleh PPTK atau Eselon IV dst) semua permusuhan harus dijabarkan dan dipasang target dan laporan capaian dilaporkan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2022 sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan antara lain :

B. Rekomendasi Bappeda Kota Pekalongan

1. Dalam menyusun Renstra disarankan untuk membuat tabel panjang sebagai dasar penyusunan target dan laporan kinerja OPD.
2. Tabel panjang berisi Tujuan Sasaran Indikator dan Target Pencapaian Misi RPJMD harus valid dan bisa menjadi

pedoman penyusunan LKJIP selanjutnya.

3. Setiap Tujuan, Sasaran dan Program sesuai dengan urutan hirarki tidak boleh menyebar harus mengerucut sesuai kapasitas jabatan.
4. Setiap Tujuan, Sasaran dan Program ada Indikator masing-masing yang tidak boleh sama karena sesuai urutan indikator, tujuan mencakup bisa lebih dari satu sasaran begitu pula indikator sasaran bisa lebih dari satu indikator program sehingga membantu kerucut
5. Tujuan dan Sasaran merupakan indikator Kepala OPD
6. Program (Outcome) merupakan indikator Bidang dan Sekretaris
7. Kegiatan (Output) merupakan indikator PPTK.

C. Rekomendasi Inspektorat Kota Pekalongan

1. Dalam penyusunan renja tahun anggaran 2022 untuk sesuai / selaras dengan Renstra Perangkat Daerah (penyajian program dan kegiatan)
2. Berkoordinasi dengan Bappeda untuk merevisi Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan
3. Dalam penyusunan Renja sesuai/selaras dengan RKPD tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misidan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerjautama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran

NO	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Hijau
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab- sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itupertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat DPRD Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan WaliKota Pekalongan Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2022

Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Kinerja Tahun		Realisasi Tahun 2021 Per Triwulan				Tingkat Capaian TW. I 2021	Data Capaian Realisasi s.d TW. II 2021	Data Capaian Realisasi s.d TW. III 2021	Data Capaian Realisasi s.d TW. IV 2021
				I	II	III	IV				
		2022	Perubahan Target 2022								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	%	100,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Tabel 3.2 Target dan Capaian Kinerja Output

KODE SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN\	SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PERUBAHAN RKPD/APBD			APBD PERUBAHAN (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan			
		KEGIATAN / SUB KEGIATAN				TW I	TW II	TW III	TW IV
		URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD				49.935.838.000				
1.00	URUSAN UMUM				32.223.548.000				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.223.548.000				
201	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100	persen	19.480.000				
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.180.000				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	2	dokumen	-	0	0	1	1
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	1	dokumen	-	0	0	1	0
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	4	dokumen	1.500.000	0	0	2	2
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.800.000				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	4	dokumen	-	1	0	1	2
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5	dokumen	-	0	0	0	5

		Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan		3	3	3	3
		Jumlah dokumen saku yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	2 dokumen	-	1	0	1	0
202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.804.259.000				
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2.741.249.000	3	3	3	3
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	61.600.000	3	3	3	3
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.410.000	0	1	0	0
205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 persen	-				
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik	0 kali	-	0	0		
206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	3.048.386.000				
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	37.000.000	3	3	3	3
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			365.300.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	-	3	3	3	3
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	34 unit	-	0	0	9	37
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	25.000.000	3	3	3	3
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			646.396.000				

04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	-	3	2	3	3
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	523.810.000	3	2	3	3
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	142.500.000	3	3	3	3
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	35.000.000	3	3	3	3
08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	247.190.000	3	3	3	3
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	1.584 orang/kali	1.550.000.000	328	436	396	424
208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	867.900.000				
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.800.000	3	3	3	3
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	173.000.000	3	3	3	3
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	693.100.000	3	3	3	3
209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.486.761.000				
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			903.911.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil yang terpelihara secara rutin/berkala	0 unit	-	0	0		

		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	35 unit	-	35	35	35	35
		Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	0 orang/bulan	-	4	4		
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			479.750.000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala	0 lokasi	-	0	0		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	-	0	0	1	1
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			103.100.000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	0 unit	-	0	0		
		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	0 unit	-	0	0		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	-	3	3	3	3
215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen	20.076.762.000				
01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12 bulan	19.249.262.000	3	3	3	3
02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	140 stel	400.000.000	0	0	0	140
03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah pelaksanaan perawatan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	35 orang/kali	427.500.000	35	0	0	0
216	Layanan Administrasi DPRD	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 persen	3.920.000.000				

03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah fasilitasi rapat dan koordinasi luar daerah alat kelengkapan dewan	225 orang/kali	3.410.000.000	70	140	105	110
		Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	129 kali		37	22	50	32
		Jumlah rapat rapat paripurna yang diselenggarakan	31 kali		5	8	0	0
04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 bulan	510.000.000	3	3	3	3
4.02	SEKRETARIAT DPRD			17.712.290.000				
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			17.712.290.000				
201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	9.314.810.000				
02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			3.771.310.000				
02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			-				
		Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	30 kali		4	6	8	9
		Jumlah Perda yang ditetapkan	15 perda	-	0	6	4	5
03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah rapat-rapat peraturan daerah yang dilaksanakan	16 kali	5.543.500.000	2	5	8	3
204	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	1.505.760.000				
02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah fasilitas pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kali	502.500.000	1	0	0	0
03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			853.260.000				
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	6 perda	-	0	0	8	0
		Jumlah publikasi / informasi kegiatan DPRD melalui media cetak	50 kali	-	30	30	18	6
06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah rapat dengan pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /toko agama yang dilaksanakan	20 kali	150.000.000	1	3	9	7

205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	1.606.720.000				
01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah rapat dengan pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /toko agama yang dilaksanakan	20 kali	260.720.000	4	2	10	6
03	Pelaksanaan Reses	Jumlah fasilitasi kegiatan reses di daerah wilayah pemilihan DPRD	3 kali	1.346.000.000	1	1	0	1
208	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 persen	5.285.000.000				
01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			5.285.000.000				
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar leislatif	140 orang/kali	-	70	140	0	0
		Jumlah fasilitas kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah	490 orang/kali	-	175	210	140	175

A.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan.

Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian Indikator kinerja Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2021, sebagai berikut

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Terpenuhinya pelayanan penyelenggaraan agenda kerja DPRD	persen	100	100	Tercapai	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas Pelayanan Publik	Nilai	75 800	77,5 970	Tercapai tercapai	Informa tif

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020, Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun realisasi belanja operasi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2021, dengan anggaran sebesar Rp 49.935.838.000,- dan realisasi sebesar Rp.48.047.264.535,- atau sebesar 96%.

Prestasi yang telah diraih oleh Sekretariat DPRD selama tahun 2021 adalah dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD telah terlaksana dengan baik, Dari target 15 Raperda, yang telah dibahas oleh DPRD sebanyak 17 Raperda dengan rincian 3 buah Raperda Usulan dari DPRD dan 14 buah raperda usulan dari Walikota Pekalongan. Selanjutnya dari 17 Raperda yang telah dibahas dan disetujui DPRD tersebut telah disahkan dan menjaadi Peraturan Daerah sebanyak 12 buah Peraturan Daerah dan 2 buah Peraturan DPRD, serta masih ada 3 buah Raperda yang masih menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam negeri dan Menteri Keuangan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya menyajikan laporan tahunan dalam periode perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. LKjIP merupakan tolok ukur kinerja yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kinerja tahunan tersebut menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Oleh karena itu, LKjIP dapat dijadikan acuan yang sangat penting dalam upaya perbaikan untuk pencapaian keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan telah diselesaikannya penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, maka kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2021 dapat diketahui pencapaiannya. Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis terpenuhinya pelayanan penyelenggaraan agenda kerja DPRD dalam menjalankan fungsinya dapat terpenuhi. Hal ini menginterpretasikan bahwa kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran tersebut berpredikat sangat baik. Segala yang dimuat atau yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pedoman untuk menentukan langkah serta arah kinerja yang tepat dimasa mendatang, sehingga perjalanan pembangunan dapat berdayaguna serta berhasil guna sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Pekalongan, Pebruari 2022

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKALONGAN



WIDARJANTO, SH M.Hum

NIP. 19660424 199603 1 002

Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD	
			Target	Satuan
1	2	3	4	5
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD			
4.02	SEKRETARIAT DPRD			
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2	dokumen
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2	dokumen
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	bulan
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	2	dokumen
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok. rencana tindak pengawasan(RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5	dokumen
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4	dokumen
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	kali
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1	dokumen
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik	2	kali
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan
		Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	18	unit
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman	11	bulan
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitas kunjungan tamu	12	bulan

4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	450	Orang/kali
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	bulan
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpeliharaan secara rutin/berkala	2	unit
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	persen
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	12	bulan
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD yang diadakan	140	stel
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah fasilitasi perawatan dan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	35	Orang/kali
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100	persen
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah bulan fasilitasi/pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD	12	bulan
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12	bulan
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100	persen